CENDEKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
https://jurnal.simfonicindekia.com/index.php/jpm
Volume 2 | Nomor 3 | Agustus |2026
e-ISSN: 3090-8523
DOI: https://doi.org/10.65430/jpm.v2i3.68

Empowering the Community of Kadu Village through the MAGER Program (Community Anti-Loan Shark Movement) to Improve Financial Literacy and Prevent Loan Shark Practices

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kadu melalui Program MAGER (Masyarakat Gerakan Anti Rentenir) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan dan Mencegah Praktik Rentenir

Muhil Mubarok[1], Rahmat Hidayat[2], Yumansir[3], Nur Safitri Wulandari[4], M. Fahri Zaki Murtadoh[5]

[1,2,3,4,5] Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Keywords *:*
MAGER;
Loan Sharks;
Financial Literacy;
Sharia Economics;
Community Empowerment.

Corespondensi Author
Muhil Mubarok
STISNU Nusantara Tangerang
Email: Portzmoehil114@gmail.com

History Artikel
Received: 17-09-2026
Reviewed: 25-09-2026
Revised: 30-09-2026
Accepted: 05-10-2026
Published: 16-10-2026

Abstract. *Observations and discussions with the Head of Kadu Village revealed that limited community literacy regarding financial management and the selection of financing sources fosters a reliance on loans from loan sharks (rentenir), particularly for meeting urgent needs or securing business capital. To address this issue, students participating in the Community Service Program (KKM) implemented the MAGER program (Masyarakat Gerakan Anti Rentenir, or Community Anti-Loan Shark Movement) through a financial literacy seminar at the Kadu Village Office. The activity involved outreach, education, discussions, and presentations covering financial management, the risks associated with loan sharks, alternative financing options, Sharia economics, and legal protection. This program was conducted in collaboration with the Sharia Economic Society (MES), Micro-Finance Institutions (LKM), the Financial Services Authority (OJK) of Banten, and the Legal Aid Institute (LBH) of STISNU Nusantara Tangerang. The results demonstrated high community enthusiasm and an improved understanding of the risks posed by loan sharks, the importance of financial management, and the selection of safer financing sources. The cross-institutional collaboration within the MAGER program represents a strategic step toward providing integrated financial education and encouraging the community to make wiser financial decisions.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan keuangan. Kemudahan dalam memperoleh informasi, melakukan transaksi, serta mengakses berbagai

layanan keuangan membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Kehadiran layanan keuangan digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko, biaya, kewajiban, dan konsekuensi dari setiap keputusan keuangan yang diambil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan akses terhadap layanan keuangan perlu berjalan seimbang dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat (Yue et al., 2022). Literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang dalam memahami, merencanakan, dan mengambil keputusan mengenai keuangannya. Masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman, memahami biaya pembiayaan, serta memilih sumber dana yang sesuai dengan kondisi ekonominya. Sebaliknya, keterbatasan literasi keuangan dapat menyebabkan seseorang mengambil keputusan finansial secara spontan tanpa memperhitungkan kemampuan pembayaran dan risiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk keuangan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, maupun pembiayaan (Uddin & Uddin, 2021).

Persoalan literasi keuangan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat di tingkat desa. Desa tidak selalu memiliki karakteristik masyarakat yang homogen. Di dalam satu wilayah dapat ditemukan masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan, buruh atau pekerja industri, pedagang, pelaku usaha mikro, pekerja informal, maupun masyarakat yang mengandalkan pendapatan tidak tetap. Perbedaan pekerjaan tersebut menghasilkan perbedaan kemampuan ekonomi sekaligus perbedaan pola pengelolaan keuangan. Masyarakat dengan pendapatan tetap mungkin memiliki pola pemasukan yang lebih mudah diprediksi, sedangkan masyarakat dengan pendapatan tidak tetap harus menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan usaha.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Desa Kadu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam kegiatan KKM, Desa Kadu memiliki karakter masyarakat yang cukup beragam. Keberadaan kawasan industri di sekitar wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat bekerja sebagai karyawan atau pekerja industri. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri melalui usaha kecil seperti warung, kedai kopi, perdagangan kecil, dan bentuk usaha lainnya. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan finansial masyarakat Desa Kadu juga beragam, mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, pembayaran kewajiban, sampai kebutuhan tambahan modal usaha (Wufron et al., 2026). Dalam kondisi tertentu, kebutuhan finansial yang muncul secara mendadak dapat membuat masyarakat mencari sumber pembiayaan yang dianggap paling mudah dan cepat. Misalnya, ketika seseorang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anggota keluarga, membayar kebutuhan pendidikan anak, memperbaiki kendaraan yang digunakan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau menambah modal usaha, tidak semua orang memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, keputusan untuk meminjam uang sering kali dilakukan berdasarkan kebutuhan yang bersifat mendesak, bukan berdasarkan pertimbangan jangka panjang mengenai kemampuan pembayaran.

Pada titik inilah praktik rentenir dapat menjadi persoalan yang perlu mendapatkan

perhatian. Rentenir pada umumnya menawarkan proses peminjaman yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan formal. Peminjam tidak selalu dihadapkan pada prosedur administrasi yang panjang, persyaratan dokumen yang banyak, maupun proses penilaian yang membutuhkan waktu. Dalam beberapa kondisi, hubungan sosial dan kedekatan antara pemberi pinjaman dengan masyarakat juga membuat proses peminjaman terasa lebih mudah. Bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang dengan segera, kemudahan tersebut dapat menjadi daya tarik yang sangat kuat. Persoalannya bukan hanya terletak pada adanya pinjaman, tetapi pada bagaimana pinjaman tersebut dikelola dan bagaimana struktur pembayaran yang dibebankan kepada peminjam. Masyarakat yang meminjam karena kebutuhan mendesak terkadang lebih berfokus pada jumlah uang yang diterima di awal daripada jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan. Ketika bunga, tambahan pembayaran, maupun jangka waktu pengembalian tidak diperhitungkan dengan baik, pinjaman yang pada awalnya dianggap sebagai solusi sementara justru dapat berkembang menjadi beban keuangan yang semakin berat. Kondisi tersebut dapat semakin sulit apabila pendapatan peminjam tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan (Sukaesih et al., 2025).

Fenomena tersebut dapat digambarkan melalui kondisi seorang pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan usahanya. Ketika modal usaha berkurang, ia mungkin meminjam kepada rentenir dengan harapan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dagangan dan menghasilkan keuntungan. Pada awalnya, pinjaman tersebut terlihat produktif karena digunakan untuk kegiatan usaha. Namun, apabila keuntungan usaha tidak cukup untuk menutup cicilan beserta tambahan pembayaran, sebagian pendapatan yang seharusnya digunakan kembali sebagai modal justru harus dialihkan untuk membayar utang. Akibatnya, modal usaha semakin kecil dan kemampuan usaha untuk berkembang juga semakin terbatas. Dalam keadaan yang lebih berat, pelaku usaha dapat kembali meminjam untuk memenuhi kewajiban dari pinjaman sebelumnya. Pola tersebut dapat menciptakan siklus utang. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kebutuhan lama, sementara kebutuhan rumah tangga dan usaha tetap berjalan. Jika kondisi ini berlangsung berulang kali, jumlah kewajiban dapat semakin besar dan ruang keuangan keluarga menjadi semakin sempit. Pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, kesehatan, atau pengembangan usaha akhirnya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Fenomena serupa juga dapat terjadi pada masyarakat yang bukan pelaku usaha. Seorang pekerja dengan pendapatan bulanan misalnya, dapat mengalami kebutuhan mendadak sebelum menerima gaji. Karena membutuhkan uang secara cepat, ia meminjam kepada pihak tertentu dengan kesepakatan pembayaran secara harian atau mingguan. Ketika hari pembayaran tiba, sebagian pendapatan harus langsung disisihkan untuk membayar utang. Jika pada saat yang sama muncul kebutuhan lain, seperti biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, atau biaya transportasi untuk bekerja, uang yang tersedia menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, seseorang dapat kembali mencari pinjaman baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terselesaikan. Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila kewajiban pembayaran dilakukan dalam jangka waktu pendek, sementara sumber pendapatan peminjam bersifat tidak tetap. Ketidaksesuaian antara waktu penerimaan pendapatan dan waktu pembayaran utang dapat menciptakan tekanan keuangan yang terus berulang. Masyarakat mungkin terlihat masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi sebagian besar pendapatannya telah terikat oleh kewajiban pembayaran. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan keluarga untuk menabung, membangun dana darurat, maupun mengembangkan usaha. Dampak praktik rentenir juga tidak berhenti pada persoalan ekonomi. Tekanan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dapat menimbulkan persoalan sosial dalam keluarga. Ketika seseorang tidak mampu

membayar sesuai kesepakatan, hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman dapat mengalami ketegangan. Peminjam dapat merasa tertekan karena harus terus memikirkan pembayaran, sedangkan keluarga juga dapat terkena dampak karena pendapatan rumah tangga harus dialokasikan untuk memenuhi utang. Dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi tersebut dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga dan kualitas kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan MAGER di Desa Kadu, persoalan tersebut bukan sekadar gambaran teoritis. Dalam sesi diskusi seminar, terdapat peserta yang menyampaikan pengalaman pribadi mengenai dampak praktik rentenir terhadap kondisi ekonominya. Beberapa peserta menceritakan adanya kerugian dan kehilangan aset dengan nilai yang bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Pengalaman tersebut merupakan pengalaman individual peserta dan bukan merupakan data statistik yang menggambarkan seluruh masyarakat Desa Kadu. Namun demikian, pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata bahwa persoalan utang dengan beban pembayaran yang berat dapat berkembang menjadi masalah ekonomi yang serius dan berdampak terhadap kepemilikan aset serta keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga (Kusumawardhani et al., 2023). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, persoalan rentenir perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan individu yang berutang. Di dalamnya terdapat persoalan literasi, akses informasi, akses pembiayaan, kemampuan pengelolaan keuangan, dan pemahaman mengenai perlindungan hukum. Masyarakat yang mengetahui pilihan pembiayaan secara lebih lengkap akan memiliki peluang lebih besar untuk membandingkan berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan. Kondisi masyarakat Desa Kadu yang didominasi oleh masyarakat urban juga dapat dilihat dari banyaknya tempat tinggal sementara atau kontrakan. Mobilitas masyarakat yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan ekonomi berkembang sesuai dengan kondisi pekerjaan dan usaha masing-masing. Sebagian masyarakat memiliki pendapatan tetap, sedangkan sebagian lainnya memiliki pendapatan yang lebih bergantung pada aktivitas usaha harian. Perbedaan pola pendapatan tersebut membuat kemampuan pengelolaan keuangan menjadi semakin penting (Anisyah et al., 2021).

Dalam upaya pengabdian ini, disarankan untuk menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini harus merangkul berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman dasar keuangan hingga keterampilan manajemen risiko dan investasi. Selain itu, perlu diperkuat kerjasama antara lembaga keuangan formal dan informal dengan pemerintah daerah dan komunitas UMKM untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi perbankan digital dan platform fintech, juga harus ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas informasi keuangan dan layanan pembiayaan. Tak hanya itu, program pendampingan dan konsultasi individual juga perlu diperkuat agar pelaku UMKM dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan literasi keuangan masyarakat (Kesumah et al., 2024).

Atas dasar persoalan tersebut, mahasiswa KKM STISNU Nusantara Tangerang Desa Kadu berinisiatif melaksanakan program MAGER (Masyarakat Gerakan Anti Rentenir).

Program ini dirancang sebagai kegiatan edukasi dan pemberdayaan yang tidak hanya menjelaskan bahaya rentenir, tetapi juga memperkenalkan pengelolaan keuangan, alternatif pembiayaan legal, perspektif ekonomi syariah, dan perlindungan hukum. Program MAGER dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), LKM, OJK Banten, dan LBH STISNU Nusantara Tangerang. Kolaborasi tersebut penting karena persoalan rentenir mempunyai beberapa dimensi yang saling berkaitan. OJK memberikan perspektif

mengenai literasi dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, LKM memberikan informasi mengenai alternatif pembiayaan, MES memberikan perspektif ekonomi syariah, sedangkan LBH memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan perlindungan masyarakat.

Tujuan utama program MAGER adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat, meningkatkan pemahaman mengenai praktik dan risiko rentenir, mengenalkan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan legal, serta mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif agar masyarakat tidak mudah masuk ke dalam lingkaran utang. Program MAGER juga diarahkan agar masyarakat memahami bahwa pencegahan rentenir tidak cukup dilakukan dengan memberikan larangan. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan pilihan. Apabila seseorang hanya diberi informasi bahwa rentenir berbahaya tanpa diberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan alternatif pembiayaan, maka ketika kebutuhan mendesak kembali muncul, pilihan lama dapat kembali digunakan. Karena itu, edukasi dan akses menjadi dua unsur penting dalam pemberdayaan (Hidayah & Agustin, 2021).

Selain itu, program ini memiliki nilai penting bagi pelaku usaha kecil. Kebutuhan modal merupakan bagian dari kegiatan usaha, sehingga pelaku UMKM perlu mengetahui cara menghitung kebutuhan modal, membedakan modal produktif dan kebutuhan konsumtif, serta mempertimbangkan kemampuan pengembalian. Pembiayaan yang digunakan secara tepat dapat membantu usaha berkembang, sedangkan pembiayaan yang tidak terukur dapat menjadi beban bagi keberlangsungan usaha. Dengan pendekatan tersebut, MAGER ditempatkan sebagai kegiatan yang menghubungkan literasi keuangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seminar menjadi media awal untuk membuka pengetahuan, sedangkan tindak lanjut yang direncanakan diarahkan pada pendampingan, konsultasi, dan penguatan akses pembiayaan legal. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari terlaksananya seminar, tetapi juga dari munculnya kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program MAGER (Masyarakat Gerakan Anti Rentenir) dilaksanakan menggunakan metode seminar literasi keuangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat Desa Kadu terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan, penggunaan pinjaman, risiko praktik rentenir, alternatif pembiayaan, serta perlindungan hukum. Literasi keuangan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan, tetapi juga mencakup keterampilan, sikap, keyakinan, dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam mengambil keputusan keuangan (Alpiansah et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan edukasi kepada masyarakat perlu diarahkan agar pengetahuan yang diberikan dapat dikaitkan dengan keputusan keuangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Metode seminar dipilih karena memungkinkan proses penyampaian informasi dilakukan secara langsung dan terstruktur, sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan diskusi dan tanya jawab dengan narasumber. Metode edukasi literasi keuangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan edukasi, serta monitoring dan evaluasi untuk melihat respons masyarakat terhadap materi yang diberikan (Paranita, 2020). Berdasarkan pertimbangan tersebut, program MAGER tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima materi, tetapi juga memberikan ruang partisipasi agar peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi keuangan mereka.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif. Pendekatan edukatif digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai

pengelolaan keuangan dan risiko penggunaan sumber pembiayaan yang tidak aman. Pendekatan partisipatif digunakan dengan melibatkan peserta dalam diskusi dan tanya jawab. Sementara itu, pendekatan komunikatif diterapkan dengan menyampaikan materi menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemilihan pendekatan edukasi tersebut juga sejalan dengan pentingnya literasi keuangan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan menempatkan peningkatan literasi keuangan sebagai salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami karakteristik dan risiko produk serta layanan jasa keuangan (Sukaesih et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan MAGER diarahkan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya rentenir, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan keuangan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan materi, tahap pelaksanaan seminar, dan tahap evaluasi. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan agar materi dan kegiatan yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum pelaksanaan seminar dengan terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan pemahaman keuangan masyarakat Desa Kadu. Identifikasi dilakukan melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) serta komunikasi dengan pihak Pemerintah Desa Kadu. Dari proses tersebut diperoleh gambaran mengenai adanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan dan pemilihan sumber pembiayaan, khususnya berkaitan dengan penggunaan pinjaman dan praktik rentenir. Tahap persiapan juga mencakup penentuan sasaran kegiatan, lokasi pelaksanaan, koordinasi dengan pihak desa, penentuan narasumber, serta penyusunan kebutuhan teknis seminar. Sasaran utama kegiatan diarahkan kepada masyarakat RW 01 Kampung Kadumanis yang terdiri atas RT 01 sampai RT 06. Penentuan sasaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap edukasi literasi keuangan dan kedekatan wilayah sasaran dengan pelaksanaan kegiatan KKM.

Pada tahap ini dilakukan pula koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Program MAGER melibatkan OJK Provinsi Banten, LKM Artha Kerta Raharja, LBH STISNU Nusantara Tangerang, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dimaksudkan agar pembahasan mengenai rentenir dan persoalan pembiayaan dapat disampaikan melalui beberapa perspektif yang saling melengkapi. Koordinasi dengan narasumber menjadi bagian penting karena materi yang disampaikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. OJK memberikan perspektif mengenai literasi keuangan dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan keuangan, LKM memberikan gambaran mengenai alternatif pembiayaan, LBH memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan perlindungan masyarakat, sedangkan MES memberikan perspektif mengenai alternatif pembiayaan dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi syariah.



Gambar 1. *Pemateri seminar literasi keuangan dan anti-rentenir di Desa Kadu.*

Tahap Penyusunan Materi

Setelah persoalan dan kebutuhan masyarakat diidentifikasi, tahap berikutnya adalah penyusunan materi seminar. Materi tidak disusun hanya berdasarkan konsep umum mengenai literasi keuangan, tetapi disesuaikan dengan persoalan yang ditemukan selama proses observasi dan komunikasi dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar seminar memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan tidak berhenti pada penyampaian teori. Materi yang diberikan meliputi beberapa pokok pembahasan, yaitu pengelolaan keuangan rumah tangga, penggunaan pinjaman secara bijak, risiko praktik rentenir, pengenalan sumber pembiayaan alternatif, pengelolaan kebutuhan modal usaha, ekonomi syariah, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Materi mengenai pengelolaan keuangan diarahkan agar masyarakat memahami pentingnya mengatur pemasukan dan pengeluaran serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi sebelum mengambil keputusan pembiayaan.

Materi mengenai rentenir diberikan dengan menekankan pada risiko yang dapat muncul apabila masyarakat mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan pengembalian. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengetahui jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan membayar. Materi juga diarahkan kepada pelaku usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya membedakan kebutuhan modal usaha dan kebutuhan konsumtif, menghitung kemampuan pengembalian, serta mempertimbangkan sumber pembiayaan yang sesuai. Pengetahuan mengenai literasi keuangan dan pengelolaan keuangan menjadi penting bagi pelaku UMKM karena kemampuan tersebut berkaitan dengan bagaimana pelaku usaha mengambil keputusan dan mengelola kegiatan keuangannya (Anisyah et al., 2021).

Penyusunan materi juga memperhatikan karakteristik peserta yang berasal dari latar belakang yang beragam. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi dibuat sesederhana mungkin tanpa menghilangkan substansi informasi. Istilah-istilah keuangan yang berpotensi sulit dipahami dijelaskan melalui contoh dan ilustrasi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, usaha kecil, pendapatan, pengeluaran, cicilan, dan kebutuhan modal.

Tahap Pelaksanaan Seminar

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari program MAGER. Kegiatan seminar literasi keuangan dilaksanakan pada 19 Agustus 2026 di Aula Kantor Desa Kadu, Kabupaten Tangerang. Sasaran kegiatan adalah masyarakat RW 01 Kampung Kadumanis yang terdiri atas RT 01 sampai RT 06. Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan dengan latar belakang ibu rumah tangga, pelaku

UMKM, dan masyarakat yang memiliki pengalaman menggunakan jasa pinjaman informal (Ramli & Jayanti, 2025). Pelaksanaan seminar menggunakan kombinasi metode pemaparan materi, sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Pemaparan materi dilakukan oleh narasumber sesuai dengan bidang keahliannya. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi dasar mengenai literasi keuangan dan risiko praktik pinjaman yang tidak aman. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan yang mereka hadapi.

Kombinasi metode tersebut digunakan karena persoalan keuangan masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat membutuhkan informasi mengenai cara mengelola pendapatan dan pengeluaran, sementara sebagian lainnya membutuhkan informasi mengenai pembiayaan usaha atau perlindungan hukum. Melalui diskusi, peserta dapat menyampaikan persoalan yang lebih spesifik sehingga materi seminar dapat dikaitkan dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Diskusi juga menjadi bagian penting karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman pribadi. Dalam pelaksanaan kegiatan, beberapa peserta menceritakan pengalaman mereka berkaitan dengan pinjaman informal dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi. Pengalaman tersebut menjadi bahan diskusi untuk memperlihatkan bahwa persoalan utang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran, tetapi dapat berhubungan dengan pengelolaan pendapatan, keberlangsungan usaha, kepemilikan aset, dan kondisi ekonomi keluarga.

Seminar menghadirkan empat narasumber, yaitu OJK Provinsi Banten, LKM Artha Kerta Raharja, LBH STISNU Nusantara Tangerang, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang. Kolaborasi tersebut memberikan perspektif yang saling melengkapi sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai risiko pinjaman, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai alternatif pembiayaan serta aspek perlindungan hukum (Rahmawati et al., 2024). Kegiatan dilaksanakan secara interaktif agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi. Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, bertanya, serta mendiskusikan pengalaman yang berkaitan dengan persoalan keuangan. Interaksi tersebut menjadi bagian dari proses edukasi karena masyarakat dapat menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan situasi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dengan mengamati respons dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi tidak menggunakan instrumen kuantitatif berupa skor pre-test dan post-test, sehingga keberhasilan kegiatan tidak dinyatakan dalam bentuk peningkatan persentase nilai. Evaluasi lebih diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keterlibatan peserta dan pemahaman awal masyarakat setelah memperoleh materi seminar. Beberapa aspek yang diamati dalam evaluasi meliputi keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan, jumlah dan karakter pertanyaan yang disampaikan, keterlibatan peserta dalam diskusi, serta kemampuan peserta menghubungkan materi dengan persoalan keuangan yang mereka alami. Respons tersebut digunakan sebagai bahan untuk melihat apakah materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh peserta.

Evaluasi juga memperhatikan kemampuan peserta dalam mengenali risiko praktik rentenir, memahami pentingnya pengelolaan keuangan, serta mempertimbangkan sumber pembiayaan yang lebih aman. Keaktifan masyarakat dalam menyampaikan pengalaman dan pertanyaan menjadi salah satu indikator bahwa isu yang dibahas memiliki keterkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam proses evaluasi, diskusi dan tanya jawab menjadi sumber informasi penting.

Pertanyaan yang muncul selama seminar memberikan gambaran mengenai aspek yang masih belum dipahami oleh peserta. Sebaliknya, respons peserta terhadap penjelasan narasumber dapat menunjukkan adanya pemahaman baru mengenai risiko pinjaman, pengelolaan keuangan, dan alternatif pembiayaan. Metode evaluasi seperti ini memiliki keterbatasan. Evaluasi dilakukan pada saat kegiatan berlangsung sehingga belum dapat digunakan untuk mengukur perubahan perilaku keuangan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil evaluasi lebih tepat dipahami sebagai gambaran awal mengenai respons, partisipasi, dan pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi. Perubahan perilaku masyarakat setelah kegiatan memerlukan pendampingan dan pengukuran lanjutan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selama proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis diarahkan untuk memahami proses pelaksanaan kegiatan, respons peserta, persoalan yang muncul dalam diskusi, serta pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan dan risiko rentenir. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut merupakan bagian dari model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang digunakan untuk mengorganisasi dan memahami data kualitatif secara sistematis (Suprihatin, 2024). Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh selama kegiatan dipilih dan difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan tujuan program. Informasi tersebut meliputi pemahaman masyarakat mengenai rentenir, pengalaman peserta menggunakan pinjaman, persoalan pengelolaan keuangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan.

Pada tahap penyajian data, informasi yang telah dipilih kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif mengenai proses pelaksanaan seminar dan respons masyarakat. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar informasi yang diperoleh dari kegiatan dapat dipahami dengan lebih mudah serta memberikan gambaran mengenai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program (Firmansyah et al., 2024). Informasi yang berasal dari diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggambarkan persoalan yang dihadapi peserta serta pemahaman yang diperoleh setelah kegiatan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan informasi yang telah direduksi dan disajikan untuk menggambarkan pelaksanaan program MAGER serta respons masyarakat terhadap edukasi literasi keuangan. Dalam model Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan perlu diperhatikan kembali kesesuaiannya dengan informasi yang diperoleh selama kegiatan (Firdaus et al., 2024). Kesimpulan tidak digunakan untuk menyatakan bahwa seminar telah menurunkan jumlah rentenir atau mengubah perilaku masyarakat secara permanen karena kegiatan belum menggunakan evaluasi jangka panjang.

Dengan metode tersebut, program MAGER dapat dipahami sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menempatkan seminar literasi keuangan sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan. Kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang dialog agar masyarakat dapat mengidentifikasi persoalan keuangan yang mereka hadapi dan memahami berbagai pilihan yang dapat dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan pembiayaan.

Hasil Dan Pembahasan

Program MAGER dilaksanakan pada 19 Agustus 2026 di Aula Kantor Desa Kadu, Kabupaten Tangerang. Kegiatan mengangkat tema 'Meningkatkan Literasi Keuangan untuk Memutus Mata Rantai Rentenir dan Bank Emok di Kabupaten Tangerang. Sasaran utama

kegiatan adalah masyarakat RW 01 Kampung Kadumanis yang terdiri atas RT 01 sampai RT 06. Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan secara aktif dengan latar belakang ibu rumah tangga, pelaku UMKM, dan masyarakat yang pernah menggunakan jasa pinjaman informal. Kehadiran peserta dari latar belakang yang beragam membuat pembahasan seminar menjadi lebih kontekstual. Ibu rumah tangga memiliki kebutuhan pengelolaan keuangan keluarga, pelaku UMKM memiliki kebutuhan modal dan pengelolaan usaha, sedangkan masyarakat yang pernah menggunakan pinjaman informal memiliki pengalaman langsung mengenai proses peminjaman dan pembayaran. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa isu literasi keuangan berkaitan dengan berbagai kelompok masyarakat (Simangunsong et al., 2026).

Seminar menghadirkan empat narasumber, yaitu OJK Provinsi Banten, LKM Artha Kerta Raharja, LBH STISNU Nusantara Tangerang, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang. Kolaborasi tersebut memberikan perspektif yang saling melengkapi. Masyarakat tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai risiko pinjaman, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai alternatif pembiayaan serta aspek perlindungan hukum. Antusiasme peserta terlihat terutama dalam sesi diskusi. Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan cara memperoleh modal usaha tanpa bergantung pada rentenir, cara mengenali lembaga pembiayaan yang legal, dan langkah hukum ketika menghadapi penagihan yang bersifat intimidatif. Pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang praktis dan dapat digunakan ketika menghadapi persoalan nyata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan rentenir tidak berdiri sendiri sebagai persoalan ekonomi. Di dalamnya terdapat aspek sosial karena berkaitan dengan kebutuhan keluarga dan usaha, aspek informasi karena masyarakat perlu mengetahui pilihan pembiayaan, serta aspek hukum karena sebagian masyarakat dapat menghadapi persoalan penagihan. Oleh sebab itu, pendekatan lintas sektor yang digunakan dalam MAGER menjadi relevan dengan karakter masalah yang ditemukan.



Gambar 2. *Pelaksanaan seminar gerakan anti-rentenir di Desa Kadu.*

Pembahasan mengenai rentenir menjadi salah satu materi yang paling banyak memperoleh perhatian. Dalam seminar, masyarakat diberikan pemahaman mengenai karakteristik pinjaman informal berisiko, termasuk kemudahan pencairan, biaya atau bunga yang tinggi, potongan pinjaman di awal, angsuran yang dilakukan dalam waktu pendek, serta kemungkinan terjadinya bunga berbunga ketika pembayaran mengalami keterlambatan. Pola tersebut dapat menyebabkan beban pinjaman semakin sulit dikendalikan. Konsep debt trap atau lingkaran utang juga menjadi bagian penting dalam edukasi. Lingkaran utang dapat terjadi ketika seseorang mengambil pinjaman baru untuk memenuhi kewajiban dari pinjaman sebelumnya. Apabila pola tersebut berlangsung berulang, pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga atau pengembangan usaha justru terserap untuk memenuhi kewajiban utang. Dalam sesi tanya jawab,

beberapa peserta mengungkapkan pengalaman kehilangan aset hingga ratusan juta rupiah akibat jeratan rentenir. Pengalaman tersebut merupakan pengalaman individual dan tidak digunakan sebagai data statistik. Namun, munculnya cerita mengenai kerugian tersebut memperlihatkan bahwa risiko praktik pinjaman informal dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Persoalan tersebut memperkuat pentingnya edukasi preventif. Masyarakat perlu memahami biaya pinjaman sebelum menerima dana, mengetahui mekanisme pembayaran, dan memperhitungkan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membayar. Keputusan mengambil pinjaman seharusnya tidak hanya didasarkan pada nominal uang yang diterima, tetapi juga pada keseluruhan kewajiban yang muncul. Materi OJK berfokus pada pengelolaan keuangan keluarga dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Salah satu pendekatan yang diperkenalkan adalah penyusunan anggaran rumah tangga dengan membagi pendapatan ke dalam kebutuhan pokok, cicilan atau kewajiban, tabungan-investasi, dan dana sosial. Pendekatan tersebut memberikan gambaran sederhana bahwa pendapatan perlu direncanakan sebelum seluruhnya digunakan. Pembahasan kebutuhan dan keinginan juga menjadi bagian penting. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan dapat membantu keluarga menentukan prioritas. Keputusan berutang untuk memenuhi konsumsi jangka pendek perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena kewajiban pembayaran akan tetap ada setelah barang atau kebutuhan tersebut terpenuhi (Karatri et al., 2024). Perencanaan keuangan juga berkaitan dengan pencatatan. Masyarakat dapat memulai dari pencatatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan membantu melihat ke mana pendapatan digunakan dan memperlihatkan ruang yang tersedia untuk tabungan maupun kewajiban. Dalam konteks UMKM, pencatatan juga membantu membedakan uang usaha dan uang rumah tangga.

Literasi keuangan tidak berhenti pada pengetahuan mengenai produk keuangan. Pengetahuan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, seperti membandingkan pilihan pembiayaan, memperhitungkan kemampuan membayar, menghindari keputusan yang tergesa-gesa, dan mengenali risiko. Karena itu, seminar MAGER menempatkan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari pencegahan ketergantungan terhadap rentenir. Alternatif pembiayaan resmi menjadi materi penting berikutnya. Narasumber memperkenalkan LKM Artha Kerta Raharja sebagai salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Informasi mengenai lembaga formal penting karena sebagian peserta lebih mengenal rentenir berdasarkan pengalaman lingkungan sekitar, sementara informasi mengenai prosedur pembiayaan resmi belum mereka pahami secara memadai. Perbedaan antara pembiayaan formal dan rentenir tidak hanya terletak pada sumber dana. Pembiayaan formal memiliki mekanisme, persyaratan, dan ketentuan yang perlu dipahami oleh calon peminjam. Dari sisi pemberdayaan, masyarakat perlu diarahkan untuk menggunakan sumber pembiayaan yang legal sekaligus memahami kewajibannya sebagai peminjam. Bagi pelaku UMKM, pembiayaan sebaiknya diarahkan pada kegiatan produktif. Modal dapat digunakan untuk kebutuhan yang memiliki hubungan dengan kegiatan usaha, seperti pengadaan bahan, peralatan, atau pengembangan usaha sesuai kemampuan. Namun, keputusan tersebut tetap membutuhkan perhitungan agar tambahan kewajiban tidak melebihi kemampuan usaha menghasilkan pendapatan (Puspita et al., 2021). Seminar juga memberikan ruang untuk membahas ekonomi syariah. Perspektif ekonomi syariah penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai legalitas pembiayaan, tetapi juga pertimbangan mengenai prinsip transaksi yang sesuai dengan nilai yang diyakini.

Keterlibatan MES memberikan tambahan perspektif dalam memahami pembiayaan dan pengelolaan ekonomi secara lebih bertanggung jawab (Ridwan et al., 2024).

Aspek hukum yang disampaikan LBH STISNU Nusantara Tangerang melengkapi materi keuangan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ketika menghadapi persoalan pembiayaan atau

penagihan, mereka membutuhkan informasi mengenai hak dan langkah yang dapat ditempuh. Edukasi hukum menjadi bagian dari perlindungan karena masyarakat yang memiliki pengetahuan akan lebih mampu menentukan tindakan ketika menghadapi persoalan (Rindiantika et al., 2023). Jika dilihat secara keseluruhan, kegiatan MAGER memperlihatkan bahwa literasi keuangan dapat menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan masyarakat. Edukasi membantu masyarakat memahami persoalan, sedangkan akses pembiayaan dan pendampingan membantu menyediakan alternatif tindakan. Karena itu, kegiatan seminar perlu dipandang sebagai tahap awal yang perlu diikuti dengan kegiatan lanjutan (Fuadah et al., 2023). Perubahan pemahaman peserta terlihat dari kemampuan mereka mengidentifikasi beberapa risiko yang sebelumnya belum dipahami, seperti bunga berbunga, mekanisme penagihan yang berisiko, serta pentingnya memeriksa legalitas lembaga pembiayaan. Perubahan tersebut diperoleh melalui interaksi langsung antara peserta dan narasumber dalam diskusi. Walaupun demikian, perubahan pemahaman tidak otomatis berarti perubahan perilaku dalam jangka panjang. Seseorang dapat memahami risiko pinjaman tetapi tetap memilih pinjaman berisiko ketika menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh sebab itu, program lanjutan perlu diarahkan pada penguatan kemampuan mengelola pendapatan, membangun kebiasaan mencatat, dan memperluas akses terhadap pembiayaan formal. Kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu kekuatan program. Perguruan tinggi melalui mahasiswa KKM berperan sebagai penggerak kegiatan, pemerintah desa menjadi penghubung dengan masyarakat, lembaga keuangan memberikan informasi alternatif pembiayaan, OJK memberikan edukasi mengenai literasi dan kewaspadaan, MES memberikan perspektif ekonomi syariah, dan LBH memberikan perspektif hukum. Sinergi tersebut membuat pembahasan lebih komprehensif.

Model kolaborasi tersebut juga dapat menjadi pola yang dikembangkan pada kegiatan berikutnya. Pemerintah desa dapat menjadi ruang koordinasi, sedangkan lembaga mitra dapat memberikan materi dan pendampingan sesuai bidangnya. Dengan demikian, program tidak bergantung pada satu kali kegiatan mahasiswa, tetapi dapat diteruskan oleh aktor lokal. Program MAGER juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan literasi berbasis komunitas. Materi seminar dapat dipecah menjadi beberapa tema sederhana, seperti pencatatan keuangan keluarga, pengelolaan utang, mengenali pinjaman ilegal, pembiayaan UMKM, dan konsultasi hukum. Setiap tema dapat disampaikan dalam pertemuan warga sehingga edukasi berlangsung secara bertahap. Tindak lanjut lain yang direncanakan adalah edukasi literasi keuangan secara berkala dan pembentukan Satgas Anti Rentenir di Kabupaten Tangerang. Pendampingan dapat difokuskan pada pencatatan keuangan sederhana, konsultasi hukum bagi korban rentenir, dan fasilitasi akses pembiayaan legal melalui lembaga keuangan daerah. Dari sisi evaluasi, kegiatan masih memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah peserta terbatas pada 50 orang sehingga belum mencakup seluruh masyarakat Desa Kadu. Durasi kegiatan juga relatif singkat dan evaluasi belum dilakukan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil kegiatan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan perilaku keuangan seluruh masyarakat Desa Kadu. Keterbatasan tersebut menjadi dasar untuk merancang evaluasi yang lebih baik pada kegiatan berikutnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat kemampuan peserta membuat anggaran sederhana, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengenali lembaga legal, serta menjelaskan risiko pinjaman. Pemantauan ulang setelah beberapa waktu juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan.

Secara substantif, program MAGER menunjukkan bahwa pencegahan rentenir membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar kampanye anti-rentenir. Masyarakat perlu memperoleh kemampuan mengelola keuangan, akses terhadap pembiayaan yang legal,

pengetahuan mengenai ekonomi syariah, dan pemahaman mengenai perlindungan hukum. Keempat unsur tersebut saling mendukung dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Ketahanan ekonomi keluarga pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi kebutuhan tanpa mengambil keputusan yang dapat memperburuk kondisi keuangan. Ketika masyarakat memiliki pencatatan, perencanaan, informasi pembiayaan, dan akses pendampingan, peluang untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa dapat dikurangi. Inilah arah pemberdayaan yang ingin dibangun melalui program MAGER. Program ini juga menunjukkan peran perguruan tinggi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. KKM tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi media untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat dan mempertemukan masyarakat dengan pihak yang memiliki kompetensi. Dalam konteks MAGER, mahasiswa berperan menginisiasi kegiatan, sedangkan penguatan substansi dilakukan bersama lembaga mitra. Ke depan, keberlanjutan program menjadi faktor yang sangat menentukan. Seminar yang hanya dilakukan satu kali berfungsi sebagai pemantik, tetapi perubahan kebiasaan membutuhkan pengulangan dan pendampingan. Karena itu, program MAGER sebaiknya dikembangkan melalui kegiatan berkala yang sederhana, praktis, dan dekat dengan kebutuhan warga.



***Gambar 3**. Foto bersama pemateri dan peserta program MAGER.*

Simpulan dan Saran

Program MAGER di Desa Kadu dilaksanakan sebagai respons terhadap persoalan keterbatasan literasi keuangan, kebutuhan pembiayaan, dan risiko ketergantungan terhadap rentenir. Kegiatan seminar memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami pengelolaan keuangan, risiko pinjaman informal, alternatif pembiayaan legal, ekonomi syariah, dan perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat yang terlihat dari partisipasi dan pertanyaan dalam diskusi. Peserta memperoleh tambahan pemahaman mengenai risiko bunga berbunga, pentingnya memperhitungkan kemampuan membayar, mengenali pilihan pembiayaan, serta pentingnya perencanaan keuangan keluarga dan usaha.

Kolaborasi OJK Banten, LKM Artha Kerta Raharja, LBH STISNU Nusantara Tangerang, dan MES Kabupaten Tangerang memperkuat program karena masyarakat memperoleh perspektif yang saling melengkapi. Meskipun demikian, kegiatan masih terbatas dari segi jumlah peserta, waktu, dan belum adanya evaluasi jangka panjang. Program MAGER karena itu perlu dikembangkan menjadi gerakan pemberdayaan yang berkelanjutan melalui edukasi berkala, pendampingan pelaku UMKM, fasilitasi akses pembiayaan legal, konsultasi hukum, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan lembaga

pendamping.

Pemerintah Desa Kadu diharapkan dapat melanjutkan edukasi literasi keuangan secara berkala melalui pertemuan warga, kelompok masyarakat, dan forum desa. Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan utang, pengenalan pinjaman ilegal, dan informasi lembaga pembiayaan resmi. Pelaku UMKM perlu memperoleh pendampingan yang lebih praktis mengenai pencatatan keuangan, pemisahan uang usaha dan rumah tangga, perencanaan modal, dan perhitungan kemampuan pembayaran. Pendampingan tersebut dapat dilakukan secara bertahap bersama lembaga keuangan dan pihak terkait.

STISNU Nusantara Tangerang diharapkan dapat menjadikan program literasi keuangan dan pencegahan rentenir sebagai kegiatan pengabdian yang berkelanjutan. Kampus juga dapat memperkuat kerja sama dengan OJK, LKM, MES, lembaga bantuan hukum, dan pihak lain yang relevan. Untuk kegiatan berikutnya, evaluasi dapat dikembangkan dengan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan serta pemantauan lanjutan. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya dinilai dari antusiasme saat seminar, tetapi juga dari penerapan pengetahuan dalam perilaku keuangan masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya mengurangi ketergantungan terhadap rentenir memerlukan edukasi yang berkelanjutan, akses pembiayaan yang legal dan mudah dipahami, serta pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Program MAGER dapat dikembangkan secara bertahap agar manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang.

Daftar Rujukan

Alpiansah, R., Dethan, S. H., Yuliana, I., Wardi, P. A., & Nirwana, B. N. (2024). Seminar literasi keuangan mengenai kebutuhan dan investasi melalui kegiatan talk show keuangan. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, *3*(2), 64–72. https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v3i2.3621

Anisyah, E. N., Pinem, D., & Hidayati, S. (2021). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Sekupang. *Management and Business Review*, *5*(2), 310–324. https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.6083

Firdaus, A. N., Anam, S., & Maulana, A. (2024). Analisis pengembangan kurikulum bahasa Arab di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. *Tsaqofiya: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, *6*(1), 197–209. https://doi.org/10.21154/tsaqofiya.v6i1.493

Firmansyah, N. I., Chan, A., & Dai, R. R. M. (2024). Analisis penerapan social media marketing Instagram pada Hotel Horison Palma Pangandaran menggunakan framework DRAGONS. *Jurnal Lentera Bisnis*, *13*(3), 1354–1381. https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1169

Fuadah, I. S., Hindrayani, A., & Totalia, S. A. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan rumah tangga dengan jaringan sosial (network) sebagai variabel moderating. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *11*(2), 77–85. https://doi.org/10.26740/jupe.v11n2.p77-85

Hidayah, F. N., & Agustin, G. (2021). Analisis hubungan antara literasi keuangan, perilaku keuangan, dan kepuasan keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, *1*(9), 854–861. https://doi.org/10.17977/um066v1i92021p854-861

Karatri, R. H., Handayani, R. T., & Prasetyaningrum, I. D. (2024). Determinan literasi keuangan, pengalaman keuangan terhadap perilaku keuangan keluarga di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(3), 3181–3200. https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4863

Kesumah, F. S. D., Mardiana, N., Muslimin, M., & Andriani, L. (2024). Peningkatan literasi keuangan dan sistem pembiayaan bagi pelaku UMKM di Desa Tarahan Lampung Selatan. *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 35–39. https://doi.org/10.23960/begawi.v2i2.49

Kusumawardhani, R., Ningrum, N. K., & Rinofah, R. (2023). Investigating digital financial literacy and its impact on SMEs' performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, *8*(12), e04097. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i12.4097

Paranita, E. S. (2020). Peningkatan literasi keuangan di Kampung Makan Rafel's Jakarta Barat. *International Journal of Community Service Learning*, *4*(3). https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i3.28858

Puspita, A. T., Lubis, D., & Muthohharoh, M. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa Muslim di Bogor. *AL-MUZARA'AH*, *9*(1), 1–20. https://doi.org/10.29244/jam.9.1.1-20

Rahmawati, I. D., Sumarno, S., & Sari, D. K. (2024). Digitalisasi UMKM dan peningkatan literasi keuangan pada UMKM. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 33–41. https://doi.org/10.51771/jukeshum.v4i1.720

Ramli, R., & Jayanti, R. D. (2025). Peningkatan literasi pengelolaan keuangan yang bijak pada karyawan PT SAPS Depo Palopo. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, *4*(1), 33–37. https://doi.org/10.62712/juribmas.v4i1.401

Ridwan, M., Fitriani, A., & Mulyawati, N. (2024). Sosialisasi literasi keuangan syariah melalui kegiatan seminar dalam acara Ramadan Youth Program. *Attamkiim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 27–35. https://doi.org/10.62070/attamkiim.v1i1.66

Rindiantika, W. D., Mufid, F. L., & Wahyuningtyas, Y. W. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi nasabah pinjaman online. *Welfare State: Jurnal Hukum*, *2*(2), 243–270. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2416

Simangunsong, R. R., Kusmawati, Y., & Priyono, P. (2026). Pelatihan manajemen keuangan bagi ibu rumah tangga di Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, *6*(1), 205–211. https://doi.org/10.37481/pkmb.v6i1.1761

Sukaesih, U., Miswan, M., & Kartika, D. G. (2024). Pelatihan literasi keuangan mengenai pencatatan keuangan UMKM di Kelurahan Cijantung. *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan*, *4*(1), 47–59. https://doi.org/10.61696/jurdian.v4i1.215

Sukaesih, U., Miswan, M., & Ibrahim, C. R. D. (2025). Financial literacy education for MSMEs culinary businesses in overcoming capital. *ICCD*, *7*(1), 241–248. https://doi.org/10.33068/iccd.v7i1.867

Suprihatin (2024). Kepemimpinan kepala madrasah dalam mengelola perubahan dan pengembangan pembelajaran. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, *9*(1), 28–40. https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v9i1.1983

Uddin, M. A., & Uddin, S. M. S. (2021). Microfinance and debt trap: An ethnographic evidence from a village in Bangladesh. *International Journal of Asian Business and Information Management*, *12*(3), 1–11. https://doi.org/10.4018/IJABIM.20210701.oa24

Wufron, W., Susilawati, W., Nurhasan, R., & Puad, N. A. B. M. (2026). Financial inclusion: Analyzed from financial literacy and use of financial technology. *Journal of Nonformal Education*, *12*(1), 269–279. https://doi.org/10.15294/jone.v12i1.22506

Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap?. *Finance Research Letters*, *47*, 102604. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604